

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Sejak tahun 2011, data laju inflasi Kota Tanjungbalai tidak tersedia karena Kota Tanjungbalai tidak termasuk dalam daerah yang dihitung laju inflasinya secara nasional, dimana untuk Sumatera Utara ada 8 (delapan) daerah yang dihitung laju inflasinya secara nasional yaitu Sibolga, Pematang Siantar, Gunung Sitoli, Medan, Padang Sidempuan, Labuhan Batu, Karo dan Deliserdang. Kota Tanjungbalai untuk sementara menggunakan data inflasi daerah yang berdekatan yaitu Kota Pematang Siantar.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Tetapi juga dipengaruhi oleh sisi suplai (penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan Pemerintah.

Pada triwulan II untuk wilayah Kota Tanjungbalai ketersediaan stok masih mencukupin dan ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, minyak goreng curah dan gula pasir. Kenaikan harga komoditas ini disebabkan karena tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, berkurangnya pasokan komoditi pangan setelah HBKN dan menurunnya produksi bawang merah dan cabai merah sedangkan kenaikan harga beras masih disebabkan karena beberapa negara masih membatasi ekspor beras untuk memastikan ketersediaan stok beras di masing-masing negara tersebut.

Dari berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai tercatat perkembangan inflasi yang berdasarkan dari Kota Pematang Siantar sebagai kota yang menjadi penghitungan IHK (Indeks Harga Konsumen) yaitu untuk Bulan April -0,19% (mtm), 3,92% (yoy), 1,65% (ytd) sedangkan untuk Bulan Mei 0,58% (mtm), 3,99% (yoy), 2,24% (ytd) dan untuk Bulan Juni -0.55% (mtm), 2,89% (yoy), 1,68% (ytd).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah di Kota Tanjungbalai yang perlu ditindak lanjuti dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Luas lahan pertanian yang sangat sedikit dan bukan daerah penghasil produksi pertanian sehingga masih membutuhkan pasokan dari daerah lain terutama dari daerah Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Karo.
2. Kondisi infrastruktur pasar-pasar tradisional yang belum cukup baik sehingga mengganggu kelancaran distribusi barang terutama komoditi pangan, hal ini juga bisa mempengaruhi ketersediaan pasokan yang ada di pasar-pasar tradisional.
3. Belum terjalinnya Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil komoditi pangan.
4. Faktor cuaca yang tidak menentuk sehingga kegiatan Gerakan Menanam belum dilaksanakan di Kota Tanjungbalai.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungbalai periode Bulan April s/d Juni Tahun 2024 antara lain :

1. Melakukan pemantauan harga secara rutin ke pasar-pasar tradisional dan ritel modern untuk mencegah terjadinya penimbunan dan memastikan ketersediaan pasokan bahan-bahan pangan di Kota Tanjungbalai terutama Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
 2. Melakukan sidak pasar menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bersama dengan unsur Forkopimda Kota Tanjungbalai.
 3. Melakukan monitoring ke pangkalan-pangkalan tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk mengecek penyaluran tabung gas elpiji kepada masyarakat agar tersalur dengan baik dan dijual dengan harga het.
 4. Menjamin lancarnya pasokan komoditas bahan-bahan pokok kepada masyarakat dan menjamin lancarnya penyaluran bantuan pangan beras kepada KPM di Kota Tanjungbalai.
 5. Melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai.
 6. Membuat Surat Edaran Walikota Tanjungbalai mengenai pengendalian kuota jenis BBM tertentu minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan pertalite.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Keberhasilan pencapaian pengendalian inflasi pada triwulan II ini dikarenakan terpenuhinya pasokan bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat Kota Tanjungbalai walaupun terjadi fluktuasi dan kenaikan harga bahan-bahan pokok yang cukup signifikan. Adapun upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diarahkan untuk menjaga kelancaran pasokan bahan-bahan pokok baik dari sisi produksi maupun distribusi yang meliputi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi ekspektasi.

Selain itu, untuk mengendalikan inflasi di daerah khususnya Kota Tanjungbalai telah dilakukan berbagai upaya oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi kedepannya diantaranya :

1. Kurangnya pelaksanaan rapat-rapat rutin bersama tim mengenai permasalahan pengendalian inflasi dan solusi yang harus diambil apabila terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan.
 2. Pelaksanaan kegiatan High Level Meeting (HLM) untuk kedepannya sebaiknya dilaksanakan setiap triwulannya atau menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga koordinasi dan informasi dapat lebih ditingkat lagi.
 3. Kehadiran Kepala Daerah dalam pelaksanaan rapat-rapat pengendalian inflasi baik secara online bersama dengan Kementriaan Dalam Negeri dan rapat-rapat teknis dengan tim.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rumusan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tanjungbalai antara lain :

1. melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan ketersediaan pasokan dan

keterjangkauan harga serta melakukan pengawasan terhadap tempat atau gudang-gudang penyimpanan komoditas pangan untuk mencegah terjadinya kelangkaan akibat penimbunan.

2. Melakukan monitoring ke pasar-pasar tradisional atau pun ritel modern bersama dengan tim teknis minimal setiap bulan ataupun per triwulan.
3. Melakukan perhitungan ketersediaan stok berdasarkan neraca pangan melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai sehingga ketersediaan stok selama satu bulan kedepan dapat di perkirakan.
4. Melakukan pengawasan dan monitoring LPG tabung 3 kg mulai dari tingkat SPBE, agen sampai dengan ke pangkalan serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan BBM serta kelangkaan BBM terutama Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
5. Memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai belanja bijak melalui media sosial ataupun melalui kelurahan-kelurahan di Kota Tanjungbalai.